

## PAPUA 2020

### MARTABAT, HARGA DIRI & HAK HIDUP SETIAP MANUSIA

#### Rekaman Pelbagai Peristiwa Januari 2020

Pada 11 April 2019, Tim Pengacara Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi (*judicial review*) UU Integrasi Papua. Argumen pokok: karena proses PEPERA (Act of Free Choice) tahun 1969 sebenarnya cacat hukum, penetapan UU Integrasi Papua itu juga tidak dapat diterima sebagai sah. Maka, sebaiknya direvisi dan ditolak. Upaya hukum ini merupakan upaya untuk mencari suatu penyelesaian akar permasalahan di Papua dengan damai dan melalui jalan hukum. Upaya ini ditanggapi oleh MK, pada 6 Januari 2020. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan revisi tidak dapat diterima, "karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam kasus itu". Para pemohon tidak terlalu kaget mendengar keputusan MK, dan akan berdiskusi untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut.<sup>1</sup>

Pasca liburan Natal, 6 Januari 2020 diharapkan bahwa semuanya akan berjalan lagi seperti biasa. Juga di wilayah seperti Intan Jaya yang akhir ini mengalami banyak tekanan karena operasi militer di wilayahnya. Sekolah YPPK di Titigi yang selama beberapa minggu menjadi 'salah satu tempat militer' hari ini menerima kembali para murid serta gurunya. Namun jumlahnya masih rendah karena ternyata sejumlah guru telah mengungsi ke Nabire dan belum kembali ke Titigi, sedangkan sejumlah anak juga takut dan trauma. Anak-anak masih takut ke sekolahnya<sup>2</sup>.

Polres Jayapura menangguk penahanan (20/12/2019). Menurut kuasa hukum para tahanan ini sebenarnya ke-20 tahanan ini mesti dibebaskan demi hukum. Emmanuel Gobay, kuasa hukum mereka, menjelaskan bahwa mereka ditangkap 30 November 2019 dan dituduh akan melakukan upacara peringatan 1 Desember di wilayah Kota Jayapura. Dan, katanya, 'sekarang (6/1/2020) mesti jelas apakah mereka masih perlu lapor diri atau sudah dinyatakan bebas demi hukum'. Pihak Polres menjanjikan bahwa nanti akan ada penilaian lanjut dan akan diberikan jawaban.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2020 ditetapkan menjadi Rp. 3.516.700 per bulan. Selama tahun 2019 UMP adalah Rp. 3.240.900. Kenaikan sebesar 8,5%.

TEMPO.CO menarik perhatian pada pendekatan keamanan di Papua<sup>3</sup>. Dalam uraian mereka diperjelaskan bahwa pihak keamanan tidak akan menyelesaikan apa-apa, dan bahwa pemerintah pusat ternyata tidak belajar dari masa lampau. Insiden-insiden selama bulan Desember 2019 diangkat dan TEMPO menekankan supaya pasukan sebaiknya ditarik. Mereka juga sangat kritis terhadap pernyataan MenKoPolHukum bahwa '*bahwa pendekatan keamanan sekarang malahan lebih dibutuhkan untuk menelanjangi gerakan separatis di Papua*'<sup>4</sup>, maka perlu penambahan pasukan! TEMPO menilai pernyataan ini sebagai suatu tanda bahwa pemerintah tidak berniat menyelesaikan apa-apa; TEMPO menulis: '*sikap keras kepala pemerintah pusat ini sama sekali tidak tepat kalau mempertimbangkan bahwa operasi keamanan sebenarnya menjadi suatu kegagalan dan*

<sup>1</sup> Lihat JUBI, 8-9 Jan, hlm 1 dan 26

<sup>2</sup> Lihat JUBI, 8-9 Jan, hlm 24

<sup>3</sup> Lihat <https://en.tempo.co/read/1290003/ending-violence-in-papua>

<sup>4</sup> Teks original: '*the security approach has become even more imperative to dress down the separatist movement in Papua*'

*secara faktual sudah merusak kehidupan sipil. Di Nduga saja 45.000 orang telah mengungsi sejak tahun lalu.... Suatu team kemanusiaan pemerintah setempat telah menemukan bahwa 182 orang pengungsi telah meninggal<sup>5</sup> Suatu strategi lain dibutuhkan; suatu strategi yang mulai menyelesaikan beberapa persoalan inti seperti pelanggaran HAM, diskriminasi dan rasisme.<sup>6</sup>*

Berjalannya proses pendidikan di pedalaman menjadi hal yang sudah lama diangkat dan memprihatinkan. Ini bukan rahasia lagi. Kali ini giliran pada distrik Beam di Kabupaten Lanny Jaya. Sejumlah mahasiswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten guna mengangkat persoalan pendidikan di distrik Beam (7/1/2020). Sering anak-anak ada, namun tidak ada tenaga pengajar; kepala sekolah tidak pernah hadir. Ada 3 SD dan 2 SMP di distrik ini. SD Inpres Beam sama sekali tidak ada kegiatan pendidikan. Kepala Dinas mengakui bahwa sejumlah guru tidak betah di wilayahnya. Namun dia berjanji akan berupaya lagi untuk meningkatkan berjalannya pendidikan. Diharapkan juga bahwa pemerintah dapat memberikan subsidi tenaga pendidik. Di tengah situasi ini, Menteri Pendidikan Indonesia akan menggantikan kurikulum. Rencana ini ditanggapi dengan kritis, karena untuk di wilayah ini sebaiknya tidak diubah lagi; lebih baik menjalankan proses belajar berbasis kearifan lokal. Juga masih diharapkan sistem membangun 'sekolah berpola asrama'.

Dewan Adat Papua (DAP) – versi Kongres III di Biak – mengkritik kebijakan penambahan pasukan ke Papua yang terus dilakukan pemerintah pusat dengan alasan mengamankan wilayah Papua dari gangguan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sekretaris DAP, John Gobay, mengatakan bahwa penambahan pasukan hanya memperuncingkan situasi di berbagai daerah yang dianggap merupakan wilayah OPM. Menyebabkan warga sipil dan aparat keamanan sendiri korban. Menurut Jhon Gobay, yang mestinya dilakukan oleh pemerintah pusat adalah membangun komunikasi dengan kelompok OPM. Membandingkan situasi beberapa tahun lalu dengan sekarang, John menyatakan bahwa sejumlah tahun lalu daerah yang dianggap wilayah OPM lebih cenderung aman. Situasi itu terjadi karena pihak Polsek, Koramil dan Kodim di wilayah itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan kelompok yang dianggap OPM. Apalagi sekarang ini penambahan pasukan ternyata diadakan sepihak tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Polda dan Kodam setempat<sup>7</sup>. Harian CEPOS (13/1/2020) ada berita bahwa sejumlah mahasiswa dari kelompok 'exodus' menghindari bahwa suatu kelompok 'exodus' lain bisa berangkat ke bandara untuk diterbangkan kembali ke tempat studinya. Ternyata yang mengatur kelompok exodus yang mau berangkat adalah Mathias Murib, yang mendirikan lembaga sendiri untuk menjalankan kegiatan pemulangan mahasiswa. Akhirnya mereka diberangkatkan walau Mathias sudah sepakat dengan 'kelompok lawan' untuk tidak memberangkatkan mereka.

Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Papua pengelolaan 80 triliun rupiah Dana Otsus sejak 2002 sampai 2019 tidak maksimal. Hal ini disebabkan ketiadaan rancangan besar penggunaan Dana Otsus Papua (13/1/2020). Dalam rancangan ini perlu dirumuskan apa yang mau tercapai di bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan yang disertai perumusan ukuran keberhasilan. Ditemukan juga kurang adanya peraturan pelaksanaan. Maka, tidak mengherankan bahwa dana Otsus tidak dikelola secara efektif. Menanggapi temuan BPK, Sekda Papua menyatakan bahwa BPK memberikan 60 hari bagi Pemprov Papua untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

---

<sup>5</sup> Teks original: 'this mule-headed stance of central government is incongruous considering how the security operation has obviously been a dismal failure and has in fact disrupted civilian life. In Nduga alone, 45 thousand residents have relocated since last year... The local government humanitarian team claimed that 182 of the displaced died'.

<sup>6</sup> TEMPO referensi ke publikasi Amnesty International Indonesia yang mencatat 69 kasus pembukuan diluar ranah hukum oleh pihak keamanan di Papua antara 2010-2018 dengan korban 95 orang (85 orang asli Papua).

<sup>7</sup> Lihat JUBI, 13-14/1/2020, hlm 3

Akhir-akhir ini persoalan penjualan amunisi (produk Indonesia) kepada Kelompok Bersenjata OPM ramai diangkat. Seorang prajurit yang menjual/memiliki amunisi, Robert Kaimana, meninggal dunia 5/1/2020 selama ditahan di Pomdam XVII/ Cenderawasih. Dia divonis 20 bulan penjara, sedangkan rekannya dihukumi 18 bulan. Bukan kasus pertama anggota TNI menjual amunisi. Pada tahun 2015 juga ada 5 anggota yang ditangkap dan dipecat. Persoalan penjualan amunisi sekarang dengan lebih serius mau diperdalam oleh Polda Papua. Pihak Polda Papua juga menerangkan mendapat informasi bahwa sejumlah senjata rakitan masuk Papua dari wilayah Lumajang, Jawa Timur<sup>8</sup>. Salah satu pertanyaan: siapa terlibat dalam bisnis amunisi illegal di Papua? Amunisi yang dipersoalkan sampai saat ini adalah amunisi buatan PT Pindad, supplier resmi bagi TNI dan Polri. Maka, direktur ALDP, Latifah Anum Siregar, menghimbau TNI dan Polri untuk mengawasi dengan lebih ketat penggunaan amunisi yang ada padanya.

Bazoka Logo akhirnya divonis 1 tahun penjara (14/1/2020). Untuk diketahui, Yusak Logo alias Bazoka Logo ditahan pada tanggal 15 Desember 2019. Semula dia dipanggil polisi dalam kapasitasnya sebagai penanggungjawab aksi damai tanggal 15 Agustus 2019. Namun akhirnya Bazoka dituduh pemalsuan dokumen oleh penyidik Polresta Jayapura. Padahal petugas Imigrasi terbukti melakukan pemalsuan surat paspor RI untuk terdakwa. Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum bagi Bazoka menilai bahwa proses hukum ini merupakan kriminalisasi aktivis hak politik Papua<sup>9</sup>.

Selama tahun 2020 di Papua akan diadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 11 Kabupaten (Waropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Boven Digoel, Asmat, Mamberamo Raya, Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo). Pemilihan awal Oktober 2020. Sekarang sudah mulai ada tanda kesibukan di sekitar itu. Seperti kegiatan Bawaslu Kabupaten Merauke yang mengingatkan kepala daerah, 'Petahana', untuk tidak melantik lagi pejabat. Selama periode menjelang Pilkada jangan diberikan ruang kepada Petahana untuk menempatkan orang yang 'dia punyai'. Maka, Petahana hanya masih boleh mengangkat pejabat di wilayahnya setelah memperoleh izin tertulis dari menteri. Di bagian Selatan akan ada dua pilkada di dua Kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel.

Munculnya berita lain yang menarik sekaligus meragukan<sup>10</sup>. Aktor utama didalam berita itu adalah seorang pengamat politik, staf UNCEN, Marinus Yaung, yang ternyata mengunjungi para tahanan (7 orang Papua) di Kalimantan Timur. Ia melaporkan bahwa mereka semua mulai sakit dan tidak sehat lagi. Menurut Marinus memang bagus kalau dipulangkan ke Papua. Ia juga menawarkan untuk memperjuangkan hal itu 'di pusat pemerintah'. Untuk itu dia meminta kelompok 'mahasiswa exodus' untuk secepat mungkin menyetujui bersama mau berangkat kembali ke tempat studi dulu. Sikap demikian bisa menjadi 'bahan negosiasi' dengan pemerintah pusat kalau mau bahwa 7 tahanan diberangkatkan pulang ke Papua. Dengan kata lain: kalau kelompok 'mahasiswa exodus' tetap nekad tinggal di Papua, kemungkinan kecil bahwa pemerintah akan mengizinkan 7 tahanan Papua dikembalikan ke Papua. Berita ini cukup mengagetkan karena dua persoalan dikaitkan, sedangkan tidak ada hubungan substansinya. Kenapa tawaran ini muncul? Pemindahan 7 tahanan ke Kalimantan diluar prosedur yang berlaku, memang menjadi persoalan tersendiri dan tidak terkait dengan persoalan 'mahasiswa exodus'.

Persoalan 'mahasiswa exodus' (jumlahnya sekarang ditaksir sebanyak 6.000 orang) ramai diangkat dan dijadikan bahan diskusi akhir-akhir ini. Malahan diisyukan bahwa kelompok exodus ini bisa menjadi ancaman selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON XX), nanti akhir Oktober. Mereka pernah menyatakan bahwa nasib mereka lebih penting daripada segala kesibukan sekitar penyelenggaraan PON XX. Sehingga kalau Pemerintah

<sup>8</sup> Lihat JUBI, 15-16/1/2020. Hlm. 2 dan JUBI 17-18/1/2020, hlm. 2

<sup>9</sup> Lihat JUBI, 15-16/1/2020, hlm. 3

<sup>10</sup> Lihat CEPOS, 15 Jan.

tidak serius menangani persoalannya, mereka bersedia untuk menggagalkan PON XX. Baik MRP dan Gubernur menyatakan bahwa akan bertemu dengan mereka untuk mencari jalan keluar. Pertemuan dengan MRP dan Gubernur bersama yang pernah direncanakan untuk tanggal 16 Januari 2020, ditunda lagi karena Gubernur belum mengagendakannya. Kapan akan diagendakan belum jelas juga. Sedangkan program Kapolda untuk mengembalikan mereka ke tempat studi lama tidak ditanggapi positif oleh para mahasiswa. Kapolda bersama Pangdam dan Ketua KNPI Papua telah membentuk Tim Pemulangan Mahasiswa Exodus; ketuanya Alexander Mauri. Pada gilirannya, Ketua DPR Papua minta mahasiswa eksodus utamakan pendidikan.

Persoalan tanah tidak pernah akan menemukan akhirnya, karena tanah merupakan satu-satunya jaminan hidup bagi yang memilikinya. Pada saat dijual atau diserahkan atau dipakasi diambil masyarakat lokal lazimnya kurang menyadari bahwa akan ada kehilangan jaminan tu. Apalagi kalau sering ditipu dalam proses pelepasan tanah itu. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Kabupaten Kerom, Servo Tuamis, menyatakan pihaknya mulai berupaya mengembalikan status lahan seluas 78 ribu hectare dari tanah transmigrasi menjadi Tanah Adat. Lahan yang mau diambil kembali itu terdiri dari 50 ribu hectare kelapa sawit dan 28 ribu hectare tanah transmigrasi. Pihaknya mulai mengklarifikasi status lahan itu berdasarkan sejarah peralihan yang dinilai ilegal<sup>11</sup>.

Masyarakat diajak untuk menjaga sumber penghidupan tradisionalnya seperti sagu. Seruan ini muncul berkaitan dengan kenyataan bahwa demi kepentingan PON XX sebagian areal sagu di Jayapura ditebang. "...semestinya tahu pohon mana yang dapat ditebang, yang mana tidak. Dan kalau ditebang perlu ada penanaman kembali", kata Kepala Suku Kampung, Bambar Orgenes Kaway (22/1/2020). Kaway menilai program penanaman kembali sagu saat ini masih jauh dari memadai<sup>12</sup>.

Masalah kekurangan gizi, atau malahan gizi yang buruk masih merupakan suatu masalah yang sangat besar di Papua. Pimpinan Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika, dr Theresia Nina N, menyatakan bahwa selama 2019 RS ini menangani 61 kasus kurang gizi dan gizi buruk (22/1/2020). Orang masuk dengan keluhan kesehatan, namun setelah diperiksa ternyata masalah sebenarnya adalah kekurangan gizi. "Yang paling dominan masyarakat asli, kalau masyarakat non-OAP paling satu-dua kasus saja".<sup>13</sup>

Berhubungan dengan catatan mengenai bobot gizi di atas, cukup memprihatinkan membaca berita mengenai 'mengurangi jumlah sekolah penerima program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)'. Hal ini dilakukan karena 'pemangkasan dana Otsus untuk kegiatan PON XX'. Tahun lalu diberikan kepada 5 sekolah, namun "tahun ini hanya dua sekolah ... karena pelaksanaan PON XX", kata pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung<sup>14</sup>. Kesan bahwa pejabat tidak tahu lagi bedakan antara 'yang penting' dan 'yang lebih penting'

Ternyata ada pertemuan tokoh-tokoh untuk membahas penyelesaian masalah di Papua serta rancangan undang-undang Otonomi Khusus yang masuk dalam tahapan program legalisasi nasional 2020. Pertemuan (25/1/2020) di Swiss Bell Hotel diselenggarakan oleh 'sejumlah tokoh pemuda'. Ternyata ada 16 pembicara/pembawa materi!<sup>15</sup> Dalam berita di JUBI Samuel Tabuni memberitahukan bahwa pertemuan ini diadakan untuk mencari solusi di Papua; dia menampilkan diri sebagai tokoh pemuda yang berasal dari Nduga. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah Pangdam Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur dari Papua dan Papua Barat dan Ketua MRP baik dari Papua dan Papua Barat. Isi pembahasan tidak

<sup>11</sup> Lihat JUBI, 20-21/1/2020, hlm. 4

<sup>12</sup> Lihat JUBI, 24-25/1/2020, hlm. 5

<sup>13</sup> Lihat JUBI, 24-25/1/2020, hlm. 8

<sup>14</sup> Lihat JUBI, 24-25/1/2020, hlm. 22

<sup>15</sup> Lihat JUBI, 27-28/1/2020

dilaporkan dalam JUBI. Namun dengan adanya 16 pembawa materi, sulit dapat dibayangkan bahwa waktu tersisa untuk pembahasan mendalam sangat sedikit.

Kontak senjata telah terjadi lagi di Intan Jaya. Katanya berita resmi, dua anggota Kelompok Bersenjata OPM tewas. Dalam JUBI<sup>16</sup> dicatat bahwa informasi sebenarnya simpansiuir karena ada berita juga bahwa ada 3 orang sipil tewas termasuk suatu anak berumur 8 tahun. KOMNAS HAM diminta mengirim tim ke Intan Jaya.

Tanggal 28 Jan 2020, 17 tahanan yang dituduh terlibat perusakan waktu demo 29 Agustus 2019 di Kota Jayapura dikeluarkan dari sel tahananannya di Polda Jayapura. Mereka tidak boleh ditahan lebih lama karena batas waktu resmi sudah tercapai. Mereka menjadi tahanan kota dan persidangan akan berkelanjutan. Pembebasan mereka dituntut oleh tim pembela buat Orang Asli Papua dan pihak polisi tidak bisa selain menerima tuntutan itu karena waktu tahanan regulir sudah habis.

Pada tanggal yang sama di Jakarta dalam persidangan terhadap 6 tahanan makar Papua tim hakim menolak eksepsi/pleidoi dari tim pembela. Maka sidang akan dilanjutkan. Diskusi sekitar persidangan 7 tahanan makar di Kalimantan masih berjalan terus namun kelihatan tidak akan berhasil memulangkan ke-7 tahanan ini untuk dipersidangkan di Papua. Sidang di Kalimantan sudah mulai disiapkan dan semua berkas sudah diturunkan kepada hakim. Menurut Pdt. Joku<sup>17</sup> pemekaran pasti akan diadakan. Menurut Joku, salah satu peserta 'kelompok 61' yang bertemu dengan Presiden (10/9/2019) dan dalam pertemuan itu mengusulkan pengadaan pemekaran, makin banyak orang mendukung dan terorganisasi dalam sejumlah kelompok tersebar di seluruh Papua. Dari Jakarta juga bisa mendengar bahwa makin banyak petinggi Negara mendukung kebijakan itu, hingga menyetujui membuat kekecualian buat Papua karena 'moratorium larangan pemekaran' sebenarnya masih tetap berlaku. Ternyata Wakil Presiden juga mengubah pendapatnya dan sekarang mendukungnya.

Tidak terlalu baru bunyinya, namun mengingat keadaan di Papua yang sangat memprihatinkan sebaiknya diperhatikan apa yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua. MRP mengungkapkan keheranannya mengenai kebijakan Jakarta dalam menangani persoalan Papua. Sejak terjadinya kasus rasisme terhadap para mahasiswa Papua, Jakarta tidak mengambil langkah serius untuk menyelesaikan persoalan rasisme Papua. Jakarta justru terus mengirimkan aparat keamanan tambahan dengan jumlah yang banyak. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan sulit memahami kebijakan yang diambil Jakarta. *'Dengan adanya tambahan militer ke Papua, Jakarta menekan warga sipil di Papua'*, kata Degey, anggota MRP. Apalagi dengan tambahan di wilayah Nduga dan Intan Jaya, makin banyak masyarakat biasa terpaksa mengungsi karena takut aparat, dan menghadapi masalah banyak seperti kelaparan, sakit dan kematian. *'Apakah ini bagian dari strategi mengamankan Freeport dan merampas kekayaan alam yang ada? Semuanya ini atas nama 'menjaga keamanan untuk masyarakat karena adanya kelompok bersenjata OPM? Dominikus Sorabut, Ketua Dewan Adat, menilai kondisi Papua saat ini sudah seperti Daerah Operasi Militer (DOM)'*<sup>18</sup>.

Tanggal 31 Januari 2020 ada berita bahwa tersangka utama mengenai tindakan rasis di Surabaya, Ibu Tri, divonis 12 bulan penjara. Vonnis ini ditanggapi sejumlah aktivis dengan menyatakan bahwa beratnya vonnis tidak adil kalau dibandingkan dengan ancaman 'ditahan seumur hidup' sejumlah tersangka di Papua yang hanya protes karena insiden tindakan rasis yang dimotori Ibu Tri.

---

<sup>16</sup> Lihat JUBI, 29-30/1/2020

<sup>17</sup> Lihat JUBI, 29-30/1/2020

<sup>18</sup> Lihat JUBI, 31-1/2/2020, hlm. 3

\*\*\*

Setelah mencatat apa yang terjadi di Papua selama bulan Januari 2020 ini, satu-dua hal menjadi dominan dalam ingatan saya, yakni: pendekatan keamanan dan kebingungan mengenai peranan pengadilan.

Segala tindakan yang diambil 'Jakarta' untuk menyelesaikan persoalan di Papua bersifat 'pendekatan keamanan'. Malahan sampai pemekaran dipaksakan jadi berdasarkan penilaian BIN sambil tidak menghiraukan segala peraturan persyaratan yang berlaku berhubungan dengan perencanaan. Kebijakan demikian terus berjalan secara 'secara penuh' walau banyak suara diangkat, termasuk mantan Wakil Presiden, yang memperjelaskan bahwa pendekatan keamanan tidak akan menyelesaikan apa-apa dan perlu diganti dengan pendekatan yang lebih bermartabat. Pemerintah Pusat kesannya tuli dan tambah kehadiran personil militer/polisi terus. Kenapa begitu sulit bagi 'Jakarta' untuk mendengar suara orang bijaksana selain suara 'penasihat militer/ polisi'? Seakan-akan hanya aparat keamanan 'selalu benar' sedangkan yang lain dinilai 'tidak memahami keadaan'. Sikap yang sama ditemukan dalam pemberitaan: seakan-akan berita resmi dari pihak aparat selalu benar, sedangkan yang lain dianggap bohong. Sementara waktu tidak dibuka kemungkinan untuk mengetahui situasi yang sebenarnya karena wilayah konflik tertutup bagi yang ingin mencari tahu. Akibatnya semuanya ini bahwa masyarakat Papua biasa menderita terus, mengalami kematian dan ketakutan, dan di-stigma-kan separatis dan kriminal.

Kelihatan bahwa suasana yang sama dicerminkan dalam berjalannya sejumlah persidangan pengadilan sejak peristiwa rasis pertengahan bulan Agustus 2019. Ternyata begitu mudah orang dijadikan tersangka sedangkan bahan bukti kesalahannya sangat minim atau tidak ada. Apalagi kalau menyangkut yang menjadi tersangka makar. Mereka ternyata bisa diberlakukan sewenang saja, ditangkap tanpa mengindahkan segala prosedur yang berlaku, dipindahkan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, dibebankan dengan saksi-saksi buatan dan seterusnya. Kesan bahwa terjadi banyak kasus 'kriminalisasi'. Kenapa dan dengan alasan apa? Siapa yang memerintahkan penerapan strategi ini dan untuk apa?

Belum ada tanda dari Pemerintah Pusat untuk menjawab serius permintaan supaya '**kita duduk bersama dan bicara**'. **Persoalan di Papua tidak dapat diselesaikan dengan senjata, dan sangat perlu dicari suatu jalan lain yang ditandai pengakuan harga diri setiap orang dan yang mengutamakan penciptaan damai, bukan konflik. Penawaran dialog yang sudah bertahun-tahun ditawarkan guna bersama menentapkan apa yang benar dan apa yang perlu diluruskan adalah satu satunya jalan yang terbuka bagi semua untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan martabat. Kenapa jalan ini kurang diminati? Kenapa tidak ada 'political will' kearah itu?** Berapa korban yang masih perlu dihitung sebelum kita semua sadar bahwa strategi Pemerintah Pusat sekarang ini hanya akan memperparah persoalan di Papua menuju jalan buntu.

Jayapura, 18 Februari 2020

Theo van den Broek